

**EFEKTIVITAS HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA
MELALUI PROGRAM AUSAID DI SEKTOR PENDIDIKAN ERA JOKOWI
PADA TAHUN 2014-2019**

Jofanka Alfiano¹ Putri Hergianasari² Dan Triesanto Romulo Simanjuntak³

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia¹ Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia² Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia³ dan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia⁴

Email: Jalfiano70@gmail.com¹ Hergianasari.putri@staff.uksw.edu²
Triesanto.simanjuntak@uksw.edu³

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Kerja sama Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama yang panjang. Sejarah kerja sama antara kedua negara yang bertetangga tersebut dapat ditelusuri kembali pada awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap upaya pengakuan kemerdekaan Indonesia dengan membawa isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB dan keikutsertaan Australia dalam menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda ([Wijayanti, 2015](#)). Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dengan Australia mulai terjalin walaupun mengalami pasang surut.

Selama lebih dari 70 tahun hubungan bilateral antara Jakarta dengan Canberra, kedua negara telah menjalin beberapa kerja sama di berbagai bidang untuk kemajuan bagi negara yang bertetangga tersebut, salah satunya kerja samanya adalah *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD) yang dikelola AusAID ([AusAID, 2006](#)). Selain itu terdapat *Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation* yang merupakan kerangka kerja sama keamanan ([AustLII, 2006](#)). Selanjutnya ada kerja sama *Joint Declaration on Maritime Cooperation* untuk bidang keamanan maritim ([Laksamana, 2018](#)).

Baik Australia dan Indonesia juga memperkuat hubungan antara keduanya dengan mengadakan berbagai forum, seperti *2+2 Dialogue*, *Annual Leaders Meeting* (ALM), dan *Indonesia-Australia Dialogue* (IAD). Dialog-dialog yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia bertujuan sebagai forum komunikasi utama secara bilateral, yang mana pemimpin bersama menteri dari kedua negara dapat berdiskusi terkait isu yang ada ([Roza, 2021](#)). Berjalannya komunikasi antara kedua negara disebabkan karena Indonesia dianggap sebagai negara yang penting bagi Australia. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara ini untuk menjaga kerja sama yang telah terjalin ([Mackie, 2007](#)).

Kebijakan Sektor Pendidikan Indonesia

Pada dasarnya, Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu landasan kebijakan pemerintah

Indonesia terkait program pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun ([Ismail, 2014](#)). Kebijakan program pendidikan pemerintah yang dilandaskan Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki tujuan agar setiap anak berumur dari 7 hingga 16 tahun bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis bagi masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya ([Rizaluddin, 2017](#)).

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan berfokus pada pendidikan karakter sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa oleh Kementerian Pendidikan, yang memuat 18 poin pendidikan karakter bangsa ([Muhaemin, 2017](#)). Hal ini didukung juga dengan kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia yang disusun dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan yang ada ([Anggara, 2014](#)). Di era Joko Widodo, sektor pendidikan memiliki berbagai sasaran, seperti angka partisipasi pendidikan, pengentasan kesenjangan pendidikan dan putus sekolah, kesiapan siswa di dunia industri, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan guru ([Kementerian PPN/Bappenas, 2014](#)).

Upaya Kerja Sama Indonesia dan Australia di Sektor Pendidikan

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan kerja sama bagi kedua negara. Salah satu fokus dalam kerja sama antara Indonesia dan Australia adalah di sektor pendidikan. Adapun bentuk kerja sama di sektor pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui AUSAID dan pemerintah Australia.

Kebijakan Luar Negeri Australia di Bidang Pendidikan 2014-2019

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, Australia menerapkan beberapa strategi kebijakan luar negeri di bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan menyediakan *Official Development Assistance* (ODA) untuk menyalurkan investasi pendidikan di beberapa negara ([Departement of Foreign Affairs and Trade, 2016](#)). Sementara di masa kepemimpinan Malcolm Turnbull pada tahun 2015-2018, kebijakan luar negeri Canberra di bidang pendidikan mengacu pada strategi bantuan investasi Australia untuk pendidikan yang dijalankan pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Strategi tersebut memiliki empat prioritas, antara lain pondasi untuk pertumbuhan anak usia dini, meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi pendidikan yang universal, dan meningkatkan akses pengembangan kemampuan. Implementasi dalam mewujudkan prioritas strategi bantuan investasi Australia untuk pendidikan dilakukan melalui pengurangan jumlah dana investasi bantuan di bidang pendidikan, yang mana diakomodasi dengan peningkatan kuota beasiswa dan upaya meminimalisir intervensi Canberra dalam pembuatan kebijakan pendidikan di negara penerima bantuan ([Universalia, 2019](#)).

Selain itu di masa Scott Morrison, bentuk kebijakan luar negeri Australia di bidang pendidikan lebih berfokus pada memberikan asistensi terhadap negara penerima bantuan agar dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas edukasinya. Asistensi tersebut diwujudkan dengan investasi yang digunakan untuk meningkatkan inovasi siswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memperkuat sistem pendidikan ([Nichols & Bodrogini, 2019](#)).

AUS-AID di Sektor Pendidikan Indonesia

Australia terlibat dalam program *Education Sector Support Programme* (ESSP) dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap program Rencana Strategis 2010-2014 milik Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui bantuan sebesar lebih dari Rp10 triliun, Australia melaksanakan program *Education Partnership* (EP) yang dipengaruhi oleh keberhasilan program AIPRD tahun 2005-2010 dan berjalan pada tahun 2011-2016 (AusAID, 2016). Dana tersebut dialokasikan menjadi 5 komponen yang terkait dengan infrastruktur SMP (C1), infrastruktur dan pengelolaan madrasah (C2), bantuan akreditasi madrasah (C3), Pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4), serta lintas komponen.

Tabel 1. Alokasi Keuangan bagi EP (dalam juta AUD)

Komponen Program	Dana
Konstruksi atau perluasan sekolah untuk meningkatkan penerimaan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) (C1)	179,3
Pembangunan dan pengelolaan madrasah / sekolah Islam (C2)	106,4
Bantuan akreditasi bagi madrasah untuk meningkatkan layanan dan kualitas sekolah (C3)	36,6
Bantuan pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4)	20,0
Layanan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan program	26,5
Jumlah	368,8

Sumber: AusAID, 2016 (diolah oleh penulis)

Dalam komponen C1, Pemerintah Australia dan Kemendikbud bekerja sama dalam membangun 1.155 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Satu Atap (SATAP) yang dapat menerima 160.000 siswa tambahan pada periode tahun 2011-2016. Bantuan dari Pemerintah Australia sebesar AUD 179,3 juta diberikan dalam bentuk dana ataupun bantuan teknis dan diselesaikan pada Januari 2017 Pada November 2016, di bawah komponen program C1, Pemerintah Australia dan Indonesia berhasil membangun 1.139 sekolah dan meningkatkan penerimaan siswa sebesar 150.000 orang. Berdasarkan hal tersebut, program EP berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan siswa hingga 1,6%. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa konstruksi sekolah di bawah program EP memiliki standar konstruksi yang bagus sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang serta mengurangi beban pengelolaan bagi sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah (AusAID, 2016).

Sementara dalam komponen C2, terfokus pada pengembangan staf profesional pendidikan dan memiliki porsi terbesar kedua dalam program EP, dengan alokasi dana sebesar 29% atau AUD 106,4 juta. Diwujudkan melalui pelatihan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan kemampuan keuangan sekolah dan berkontribusi dalam komunitas. Didukung dengan pengembangan tenaga di sektor pendidikan. Program pengembangan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan di Indonesia. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015, program pengembangan tenaga pendidikan dalam C2 telah melatih lebih dari 3,500 pengawas dan 17,775 kepala sekolah di Indonesia (AusAID, 2016). Selain itu, AusAID juga membantu guru untuk mengembangkan inovasi sistem pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dibuktikan pada tahun 2018, yang mana Australia membantu pelatihan 2774 guru dan 446 tenaga pendidik dari 907 sekolah untuk meningkatkan

pembelajaran bagi 77.912 siswa sekolah dasar ([Department of Foreign Affairs and Trade, 2019](#)).

Pada komponen C3, Australia memberikan hibah bersyarat sebesar AUD 10 ribu masing-masing kepada 1.500 sekolah dasar dan sekolah menengah madrasah dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam akreditasi institusi ([Department of Foreign Affairs and Trade, 2019](#)). Program C3 dirumuskan untuk mendukung rencana strategis dari Kemenag yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas madrasah dan sistem pendidikan Islam. Program ini merupakan kelanjutan dari program bantuan AusAID sebelumnya, *Learning Assistance Program for Islamic Schools* (LAPIS). Kerangka akreditasi dan penerapan C3 dipegang oleh Kemenag yang kemudian dikelola melalui Mitra Pelaksana Sub-Nasional di provinsi tujuan ([AUSAID, 2016](#)).

Sedangkan pada komponen C4, Australia menerapkan Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis atau ACDP, sebuah kerangka yang mempromosikan penelitian dan dialog kebijakan di sektor pendidikan. Pembuat kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan kerangka analisis ACDP dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran, lalu digabungkan dengan bukti dari ACDP dalam kebijakan sektor pendidikan yang relevan ([AusAID, 2016](#)).

Selain keempat komponen tersebut program EP juga memberikan asistensi terkait isu-isu lintas komponen atau yang tidak termasuk ke dalam keempat isu tersebut. Isu-isu yang termasuk lintas komponen antara lain penyeimbangan gender aktivitas pelatihan pendidikan, yang mana 54 persen dari peserta merupakan tenaga didik perempuan. Tidak hanya itu, isu lintas komponen juga meliputi kesetaraan akses pendidikan, khususnya bagi kaum disabilitas, dibuktikan melalui implementasi program C1 yang mengharuskan infrastruktur pendidikan agar mengakomodasi siswa disabilitas dengan fasilitas toilet dan tangga khusus ([AusAID, 2016](#)).

Bantuan Australia di Sektor Pendidikan Indonesia

Kerja sama dan bantuan yang diberikan oleh Australia untuk sektor pendidikan Indonesia tidak hanya diterapkan melalui AusAID, tetapi juga diwujudkan dengan program kerja sama lainnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Australia dan Indonesia dalam kerja sama di sektor pendidikan adalah *Technical Assistance for Education System Strengthening* (TASS). Program ini dilaksanakan agar dapat berkontribusi pada sistem pendidikan Indonesia dengan membawa perubahan berkelanjutan dalam kebijakan dan sistem pendidikan. Melalui suntikan dana sebesar AUD 11,98 juta, TASS menyediakan asistensi jangka pendek bagi pembuat kebijakan dan mendorong terciptanya kolaborasi antar *stakeholders*. Tidak hanya itu, TASS juga berjalan beriringan dengan program lainnya seperti *Improving Dimension of Teaching, Education Management, and Learning Environment* milik World Bank dan *Innovation for Indonesia's School Children* milik pemerintah Australia ([Department of Foreign Affairs and Trade, 2017](#)).

Kerja sama lain terkait pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Australia adalah *Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI). Program INOVASI didesain untuk mencari tahu apa metode yang dapat diterapkan oleh guru dan siswa agar dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2014, INOVASI diterapkan dengan berkolaborasi bersama pemerintah Indonesia dan *stakeholders* terkait melalui identifikasi perubahan yang dapat diterapkan di dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, INOVASI juga mengedepankan eksperimen dalam penerapan metode pembelajaran dan mengumpulkan timbal balik dari eksperimen

tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya ([Department of Foreign Affairs and Trade, 2014](#)).

Ketercapaian Kerja Sama Indonesia-Australia di Sektor Pendidikan

Ada beberapa hasil yang tercapai bagi pendidikan di Indonesia dari adanya kerja sama dengan Australia. Dari program-program bantuan yang diberikan oleh Australia melalui AusAID, capaian yang dipetik, antara lain adalah fasilitas konstruksi sekolah yang memiliki standar kualitas tinggi yang dibangun dengan baik, didukung oleh fungsi bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk apapun dan kapanpun. Selain itu, ProDEP yang merupakan bagian dari program bantuan pendidikan dari AusAID juga memiliki dampak dengan adanya penerapan modul dari ProDEP untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik. AusAID juga berkontribusi dalam membantu replikasi model akreditasi C3 untuk sekitar 3.153 madrasah di seluruh Indonesia, ditambah dengan peningkatan kualitas di 2.000 madrasah di Jawa Tengah ([AUSAID, 2016](#)).

Program kerja sama Indonesia-Australia di luar AusAID juga menghasilkan beberapa capaian. Salah satunya adalah program INOVASI yang berhasil meningkatkan kapasitas kualitas guru dalam mengajar di berbagai provinsi. Tidak hanya itu, INOVASI juga menyumbang puluhan ribu buku untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Capaian tersebut didukung dengan dibentuknya ribuan fasilitator daerah di provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru ([INOVASI, 2020](#)).